I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebuah semboyan yang mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena niat dari pelakunya akan tetapi karena adanya kesempatan, dari kesempatan itulah kejahatan dapat terjadi. Mengenai masalah kejahatan, dimana kejahatan tersebut sulit untuk diprediksi atau ditebak, kapan kejahatan itu akan timbul dan kapan kejahatan itu tiada. Kejahatan itu sulit untuk dimengerti, apapun bentuk, jenis, besar maupun kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk sebagai kejahatan yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Seiring perkembangan dan kemajuan di setiap negara terutama di Indonesia, beragam

kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana semakin luas, korbannya bukan hanya orang dewasa, anak dapat menjadi korban tindak pidana, banyak kasus perkosaan yang sering terjadi yang korbannya menimpa anak.

Anak mendapatkan perlakuan yang salah terutama kejahatan seksual, anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban ialah anak di bawah umur. Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataan lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.¹

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sedangkan anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala jenis bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yaitu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,

¹Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007) hal. 7

memajukan kesejahteraan umum, memncerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korban perkosaan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Pengertian anak seperti telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan. Sedangkan tindak pidana perkosaan sebagai mana di atur dalam Pasal 285 KUHP adalah :

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.² Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlunya perlindungan hukum untuk anak korban tindak pidana perkosaan sangatlah penting, karena korban masih anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat. Perlindungan bagi anak korban perkosaan ini haruslah perlahan karena anak yang mengalami tindak pidana perkosaan memiliki trauma apa yang terjadi atas dirinya. Disinilah tugas aparat hukum dan pemerintah memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban.

Dewasa ini banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya dalam tindak pidana perkosaan yang korbannya menimpa anak seperti di wilayah hukum Lampung Utara contohnya: Laporan Polisi (No Reg : B/128/VIII/2010/Reskrim). Bahwa terdakwa JAAN BIN SATRA pada hari selasa tanggal 27 juli 2010 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di rumah tersangka di Dusun Talang Baru Desa Suka Mulya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tindak pidana

² *Ibid.* hlm. 8.

perkosaan yang di lakukan selama 2 tahun lebih dan terakhir 27 juli 2010 sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur di Dusun Talang Baru Desa Suka Mulya Kec. Tanjung Raja Kab. Lampung Utara, yang dilakukan oleh tersangka JAAN BIN SATRA terhadap korbannya Bunga(bukan nama sebenarnya). Peristiwa tersebut terjadi ketika korban tertidur, dengan cara tersangka memaksa korban untuk bersetubuh dengan tersangka dengan ancaman apabila korban tidak mau, tersangka tidak akan mengurus keluarga korban lagi dan tidak akan menyekolahkan korban lagi.³

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak”

³ Berkas Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Lampung Utara
No. Berkas Perkara : BP/134/VIII/2010/RESKRIM

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan ?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Lampung Utara. Yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan faktor-faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap anak, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penulisan ilmiah ini yang bersifat atau mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak.
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

Perlindungan anak sendiri perlu dilaksanakan sejak sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut⁵:

- a) Sebelum Sidang Pengadilan
- b) Selama Sidang Pengadilan
- c) Setelah Sidang Pengadilan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986) hlm 125.

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sarupi Kunang selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polres Lampung Utara pada tanggal 22 July 2013 pukul 10:00 WIB

Pengertian Perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat manusia, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.⁶

Menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh

⁶ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung, PT. Eresco, 1995) hlm 136.

terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut⁷ :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung perlindungan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dalam perlindungan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.⁸ Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi yang untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Bandung : Rajawali 1983) hlm 6.

⁸ *Ibid.* hlm. 24

- a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya.⁹
- b. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana sedangkan anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin.¹⁰
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹¹
- e. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹²
- f. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1):

⁹ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta 1991) hlm 13.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung, Refika Aditama 2001) hlm 38.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, (Bandung; 1986) hlm 25.

¹² *Ibid.* hlm 40.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari terpilihnya tema dan judul untuk penelitian skripsi ini, kemudian rumusan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, majalah, koran, tesis, internet, jurnal, dan lain sebagainya

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Memperoleh Data, Populasi dan Sampel, Teknik Analisis Data.

IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis

keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya pengambilan kesimpulan.

V . PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran dari penulis sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan skripsi ini.